

## **EVALUASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA KOPERASI DENGAN MEKANISME KEMITRAAN KOPERASI – BANK (STUDI KASUS KOPERASI PETANI KAKAO – BANK SYARIAH MANDIRI)**

*Cost Evaluation of Coperation Capital Work Wife Partnership  
Mechanism of Coperation – Bank (Case Study of Cocoa  
Farmer Coperation – Syariah Mandiri Bank)*

**Akhmad Baihaqi<sup>1</sup>, Ahmad Humam Hamid<sup>1</sup>, Yusya Abubakar<sup>1</sup>, dan Ashabul Anhar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,  
Darussalam, Banda Aceh

E-mail: akhmad.baihaqi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan dan memberikan alternatif strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan modal kerja koperasi. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan sampel pengelola koperasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas berdampak terhadap proses pembiayaan. Strategi untuk mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan tahapan proses: (1) *Forum Group Discussion (FGD)* untuk memberikan peta sosial koperasi dalam hal karakter, pengetahuan dan pola kerja, (2) Pelatihan simulasi operasi bisnis untuk meningkatkan kompetensi tata laksana usaha, (3) Pelatihan berbasis studi kasus untuk menjawab kendala yang timbul dari kegiatan usaha.

Kata kunci: koperasi, modal kerja

### **ABSTRACT**

*The research aims to identify constraints the implementation of financing and provide alternative strategies to optimize of working capital financing facilities. The study uses a survey method, sample are cooperative management. Data analysis using quantitative data and analyzed descriptively. The results showed are weak of transparency and accountability that impact to financing process. Strategies to optimize the human resources process conducted by: (1) FGD, to provide of cooperatives social maps in character, knowledge and work patterns, (2) business operation simulation training to improve the competence of business administration, (3) case study-based training to respond business activities issues of working capital.*

*Keywords: cooperative, working capital*

### **PENDAHULUAN**

Kakao (*Theobroma cacao*) merupakan salah satu komoditi perkebunan rakyat yang dapat diandalkan untuk dikembangkan selain kopi. Upaya pengembangan dan memperkuat ekonomi sektor pertanian subsektor perkebunan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh melalui program *Economic Development Financing Facility (EDFF)*.

Program yang bertujuan mengembangkan ekonomi petani dari perkebunan kakao ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Petani kakao di wilayah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur umumnya masih tergolong miskin karena rendahnya pendapatan yang mereka peroleh dari tanaman kakao tersebut yaitu rata-rata 5,5 juta rupiah per ha per tahun (Actionaid Australia-Keumang, 2010 dan Actionaid Australia-Keumang, 2012). Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi petani adalah ketersediaan dan akses permodalan sehingga petani tidak dapat bersaing untuk mendapatkan nilai tambah harga dengan kuantitas produksi yang dimiliki. Salah satu upaya untuk memperkuat basis usaha kakao rakyat adalah dengan mengembangkan suatu pola pembiayaan modal kerja bagi organisasi (koperasi) petani kakao. Dengan dukungan dana dari *Multi Donor Fund* (MDF), *Action Aid Australia* bersama Yayasan Keumang mengembangkan suatu pola kerjasama antara koperasi primer dan koperasi sekunder dengan lembaga keuangan di 3 kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur untuk meningkatkan rantai nilai kakao bagi petani. Langkah untuk meningkatkan nilai tambah harga melalui kuantitas produksi, memperkuat kelembagaan koperasi dan modal kerja, dengan peranan kelembagaan dapat diciptakan daya tawar yang lebih baik dalam perdagangan komoditi kakao tersebut. Bantuan modal kerja diberikan kepada petani kakao melalui 9 unit koperasi primer, empat unit di Kabupaten Pidie, tiga unit di Kabupaten Aceh Utara, dan dua unit di Kabupaten Aceh Timur yang beranggotakan petani kakao di tiga kabupaten dengan jumlah anggota 4.500 petani. Untuk mendukung peningkatan rantai nilai pemasaran koperasi-koperasi primer membentuk 1 (satu) unit wadah bersama yaitu koperasi sekunder. Kucuran dana modal kerja diperuntukkan bagi unit usaha koperasi dalam tahap I ini untuk mendukung aktivitas jual beli biji kakao yaitu sebesar 3 milyar rupiah yang dimulai pada 14 Februari 2012-16 Agustus 2012 (6 bulan). Masing-masing pembagian dana yaitu 200 juta rupiah untuk koperasi primer dan 1,2 milyar bagi koperasi sekunder dan ditempatkan di bank sebagai jaminan usaha (Colateral). Besarnya dukungan modal kerja koperasi sekunder bertujuan mendukung likuiditas modal kerja koperasi sekunder. Tantangan yang dihadapi oleh usaha yang baru mulai berjalan adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola keuangan dan bisnis kakao. Daya saing usaha koperasi dengan para pesaing adalah tersedianya modal, pengetahuan, tanggung jawab, dan karakter sosial masyarakat turut mendukung daya ungkit koperasi untuk mencapai kesuksesan. Untuk mencapai kemandirian koperasi perlu pula dilakukan peningkatan keahlian dan monitoring yang berbasiskan kebutuhan pengelola dan anggota.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap 9 sembilan unit koperasi primer dan 1 (Satu) unit koperasi sekunder yang tersebar di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner terhadap kinerja operasional koperasi dalam pengelolaan modal kerja, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat di dalam program pembiayaan dan studi literatur lainnya. Sebaran koperasi dan lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Lokasi dan sebaran sampel penelitian.

Lokasi	Unit Kerja Koperasi
<b>Kabupaten Pidie</b>	
Kecamatan Padang Tiji	Meuguna
Kecamatan Mila, Keumala dan Sakti	Beuratana
Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang	TMG
Kecamatan Glumpang Tiga	APKO
Kecamatan Glumpang Tiga	Pusat Koperasi Kakao Aceh
<b>Kabupaten Aceh Utara</b>	
Kecamatan Langkahan	Ingin Maju
Kecamatan Pirak Timur, Paya Bakong, dan Grudong Pase	Aneuk Ban Keumang
Kecamatan Cot Girek	Pertanian CocoaA
<b>Kabupaten Aceh Timur</b>	
Kecamatan Peunaron	Aceh Berkat
Kecamatan Peudawa dan Rantau Pereulak	Aceh Mekar

Pengumpulan data primer pada survei ini dilaksanakan melalui kombinasi antara: 1) pengamatan lapangan (*observation*), diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*) dengan semua *stakeholder*, dan wawancara dengan responden (petani) dalam bentuk kuesioner.

Analisis data diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah responden. Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif akan diperoleh hasil “pemaknaan dan penjelasan” terhadap berbagai kondisi dan fakta serta informasi yang diperoleh terkait petani kakao di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

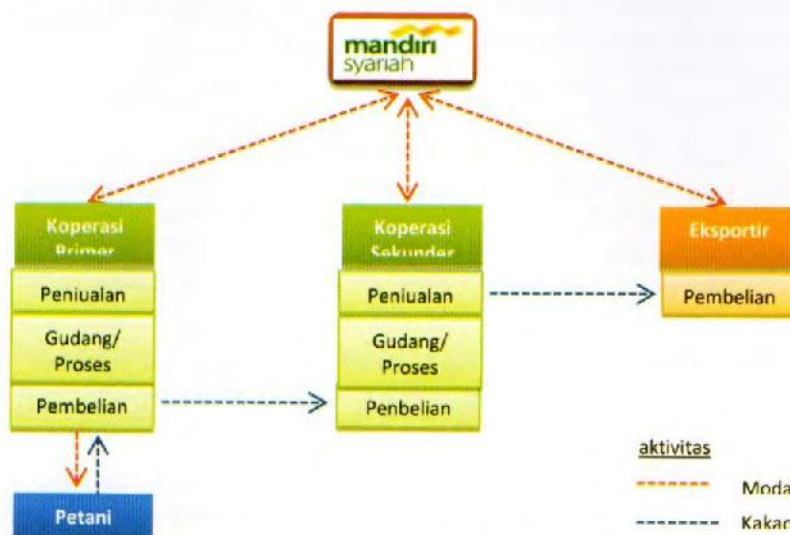
### Skema Pembiayaan

Upaya untuk meminimalkan ketimpangan bagi petani kakao dilakukan dengan membentuk lembaga formal petani melalui pembentukan koperasi. *ActionAid* dan Yayasan Keumang sebagai pelaksana program membentuk tujuh koperasi primer dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dua koperasi primer, serta satu unit koperasi sekunder sebagai induk koperasi-koperasi primer. Koperasi ini merupakan salah satu langkah meningkatkan produktivitas kelembagaan sosial yang menunjang.

Modal kerja yang disediakan oleh *Multi Donor Fund* (MDF) tersebut berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diambil oleh koperasi untuk membeli kakao dari petani anggotanya. Program ini MDF dalam pelaksanaannya menyediakan dana modal kerja, namun modal kerjanya tidak diberikan langsung kepada koperasi. Modal kerja ditempatkan di dalam rekening investasi terikat pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam mekanisme pembiayaan syariah ini sebagai jaminan pinjaman koperasi, selanjutnya koperasi akan melakukan pinjaman ke BSM yang didukung oleh modal kerja (jaminan). Mekanisme pembiayaan Modal Kerja tersebut diatur oleh sistem perbankan syariah.

Kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi-koperasi dengan lembaga keuangan (Bank Syariah Mandiri) sebesar 3 milyar rupiah (Rp 200.000.00 untuk 9 koperasi primer dan Rp 1.200.000.000,- bagi koperasi sekunder) sebagai jaminan. Realisasi pembiayaan yang dijalankan kepada koperasi petani kakao pada tahap pertama adalah sebesar Rp 50.000.000,- untuk sembilan unit koperasi primer atau total Rp

450.000.000 dan Rp 600.000.000,- bagi satu unit koperasi sekunder. Alokasi kebutuhan modal kerja koperasi sekunder lebih besar sebagai upaya untuk menyokong aktivitas pembelian dari sembilan unit koperasi primer. Aktivitas operasional modal kerja koperasi tersebut dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram aktivitas usaha koperasi primer dan koperasi sekunder

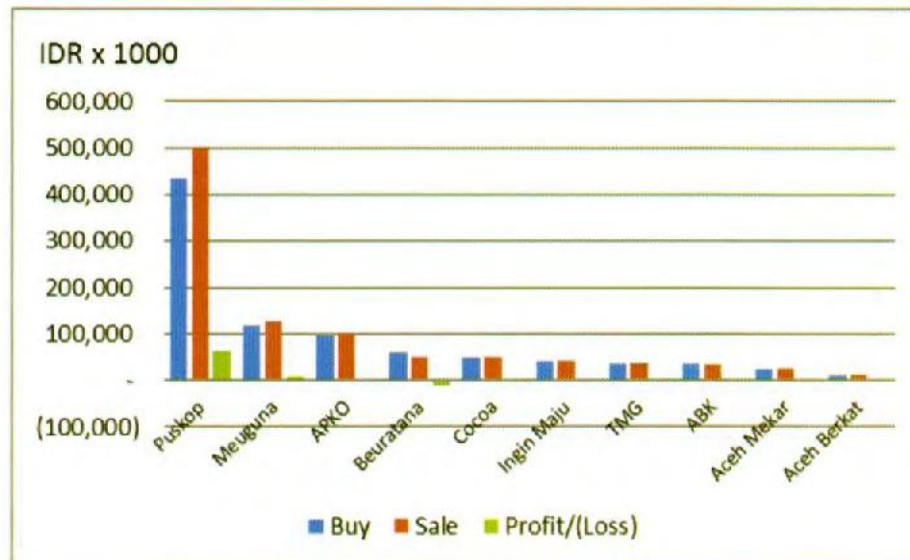
Pelaksanaan dari kesepakatan pembiayaan antara koperasi dan Bank Syariah Mandiri dengan jelas mengatur sistem bagi hasil bagi debitur dan kreditur tersebut, yaitu; (a) modal kerja dipergunakan koperasi untuk membiayai modal usaha jual-beli biji kakao yang dilaksanakan oleh koperasi primer dan koperasi sekunder; (b) nilai bagi-hasil atas penyaluran pembiayaan investasi terikat kepada Koperasi sebagai pemilik dana adalah 4% per tahun; (c) nilai bagi-hasil yang diperoleh BSM atas pengelolaan investasi terikat adalah 2% per-tahun, yakni biaya administrasi ditanggung oleh BSM; (d) Nilai bonus yang diperoleh Koperasi dari Rekening Giro Syariah Mandiri adalah 0,8% flat p.a.; (e) Nilai bagi-hasil yang diperoleh Koperasi dari Rekening Tabungan Syariah Mandiri adalah 3,4% flat p.a. (f) Nilai bagi-hasil yang diperoleh dari deposito Rekening Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah 4% flat p.a., (g) Jangka waktu untuk peminjaman tahap pertama dibatasi sampai dengan 6 (enam) bulan (Baihaqi *et al.*, 2012).

#### Implementasi Pembiayaan dan Tantangan Koperasi

Kebersamaan koperasi didukung dengan tersedianya unit kerjasama yang akan mendorong usaha koperasi. Kerjasama yang dibentuk oleh koperasi-koperasi primer adalah membentuk "Pusat Koperasi Kakao Aceh" sebagai koperasi sekunder pemersatu kerjasama. (Meyer, 1994 dalam Krisnamurthi, 1998) menjelaskan "koperasi sekunder atau organisasi pemusatan bertujuan untuk mengembangkan bisnis koperasi primer, guna mewujudkan peran sebagai pengimbang dalam ekonomi pasar kapitalistik. Koperasi sekunder mengutamakan penerapan prinsip-prinsip bisnis sehubungan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi, dan disisi lain tetap dikelola secara demokratis.

Implementasi pembiayaan bagi koperasi-koperasi dilapangan menunjukkan adanya

kelemahan yang umum terjadi ketika suatu usaha kecil menengah mulai beraktivitas, yaitu transparansi dan akuntabilitas keuangan dari sisi internal koperasi dan penyediaan dana cicilan pengembalian kredit kepada bank disisi eksternal koperasi. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan ini disebabkan lemahnya kemampuan sumber daya manusia, akibat yang ditimbulkan adalah kerugian pada kegiatan awal pembelian terutama oleh koperasi-koperasi primer. Aktualisasi kinerja keuangan koperasi dalam periode awal pembiayaan dijelaskan melalui keuntungan dan kerugian disajikan pada Gambar 2.



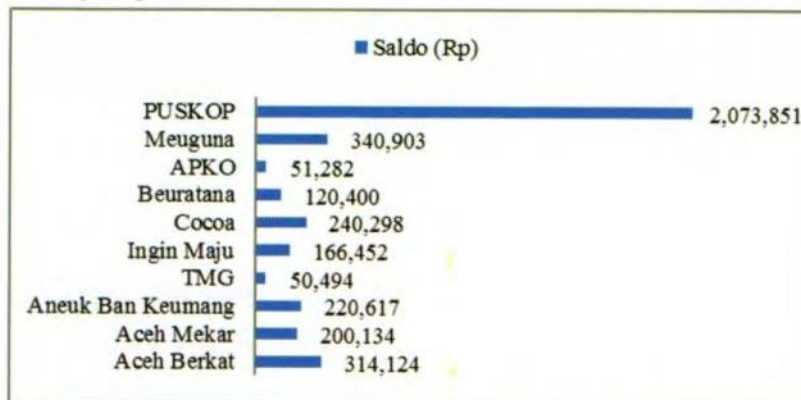
**Gambar 2.** Aktualisasi operasional pembelian dan penjualan koperasi primer dalam pembiayaan modal kerja

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh sepuluh koperasi dalam masa pembiayaan yaitu, terdapat dua koperasi yang memperoleh keuntungan lebih dari 8 juta rupiah yaitu Pusat Koperasi Kakao Aceh dan Meuguna, dua koperasi memperoleh keuntungan lebih dari 1 juta rupiah yaitu APKO dan Ingin Maju, tiga koperasi membukukan keuntungan di bawah 1 juta rupiah yaitu TMG, Aceh Mekar dan Aceh Berkat, sementara itu tiga koperasi mengalami kerugian yaitu Beuratana, Cocoa dan Aneuk Ban Keumang.

Untuk menanggulangi kelemahan koperasi tersebut langkah perbaikan yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan pendampingan bagi koperasi-koperasi. Kegiatan monitoring di lapangan membantu koperasi dalam memperbaiki kinerja keuangan sekaligus manajerial para pengelola koperasi. Secara nyata kondisi yang dialami pengelola koperasi tersebut dapat dijelaskan bahwa, walaupun telah diberikan pelatihan dibidang manajemen dan keuangan mereka belum memiliki pengalaman dalam aktivitas usaha. Melalui pendampingan pengelola koperasi dibekali kembali pengetahuan keuangan dan manajemen yang sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi. Kondisi lapangan tersebut antara lain: (1) modal yang dicairkan dipegang tidak hanya oleh bendahara; (2) tidak taat dan jelas pencatatan pembukuan; (3) modal tunai terlalu lama dipegang bukan oleh bendahara; (4) pengelola meminjam modal kerja untuk kepentingan

pribadi; (5) penaksiran harga beli tidak sesuai dengan acuan harga yang disepakati dan; (6) fluktuasi harga pasar kakao.

Setelah dilakukan monitoring dan pelatihan pendampingan bagi keporasi, perbaikan tata kelola manajerial pengelola koperasi mampu meningkatkan kinerja operasional terutama transparansi dan akuntabilitas keuangan. Capaian kondisi tersebut mampu mendorong kemandirian koperasi dalam pengelolaan pembiayaan perbankan. Hasil capaian penggunaan modal kerja walaupun tidak signifikan memberikan keuntungan maksimal, koperasi-koperasi telah mampu membukukan saldo bersih positif pada tahap pertama pembiayaan antara koperasi dan Bank Syariah Mandiri. Kinerja keuangan koperasi dijelaskan berdasarkan jumlah saldo pada akhir tutup buku periode pertama pembiayaan seperti pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Kinerja operasional keuangan koperasi setelah monitoring dan pendampingan

Model pelatihan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja operasional koperasi dilakukan dalam tiga tahapan, dan di lapangan berdasarkan spesisik kendala yaitu: (1) FGD kepada pengelola (pengurus, pengawas dan manager), hasil kegiatan akan memberikan peta sosial koperasi dalam hal karakter, pengetahuan dan pola kerja. Kondisi tersebut untuk menyatukan keberagaman, "Keberagaman dan perbedaan terjadi karena fitrah manusia yang selalu ingin menunjukkan dan mempertahankan eksistensi dirinya (Sumadi T. dan Japar M., 1998 dalam Supardi, 2009); (2) Pelatihan simulasi operasi bisnis diberikan kepada manajer selaku pengelola unit usaha, selain untuk meningkatkan kompetensi tata laksana jual beli serta pengelola mampu menjalankan usaha sesuai dengan Prosedur Standar Operasional unit bisnis koperasi; (3) Pelatihan berbasis studi kasus untuk menjawab tantangan yang timbul dari kegiatan usaha, pelaksanaan pelatihan diberikan kepada pengelola keuangan untuk meningkatkan kompetensi bagi masing-masing koperasi sehingga dapat menguasai teknik pemecahan masalah yang diperlukan. Pelatihan berbasis kompetensi difokuskan pada kinerja aktual, dengan pendekatan kompetensi peserta pelatihan diharapkan tidak sekedar tahu, tetapi juga dapat melakukan sesuatu yang harus dikerjakan (Magkuprawira, 2009).

Kendala ketepatan waktu dalam penyediaan dana cicilan pengembalian kredit kepada bank merupakan kelemahan bagi usaha bisnis yang baru berjalan, di samping masih minimnya pengalaman usaha. Mengacu kepada aspek-aspek tersebut, penerapan sistem cicilan kredit disesuaikan dengan kepentingan koperasi, kondisi ini didasari bahwa modal kerja yang terus berputar dalam aktivitas jual beli. Sehingga Model pembayaran cicilan

dilakukan dengan pola: (1) cicilan bagi hasil dibayarkan setiap bulan selama masa pembiayaan; (2) cicilan kredit dibayarkan sekaligus pada periode akhir pembiayaan. Untuk meningkatkan aktiva koperasi, dilakukan penerapan pengendalian biaya operasional. Pengendalian biaya merupakan masalah penting dalam mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas bagi usaha, unsur tenaga kerja dan operasional merupakan sumber yang paling dominan dalam biaya. Untuk mengurangi biaya tersebut perlu dilakukan evaluasi biaya tenaga kerja dan *overhead* (Horne dan Wachowicz, 2009).

### KESIMPULAN

Lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang disebabkan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pengurus koperasi, sehingga tidak terciptanya kesamaan misi organisasi dan lemahnya transparansi pengelolaan keuangan mengakibatkan tidak tertata dengan baiknya pengelolaan pembukuan. Rendahnya akuntabilitas berakibat tidak terlaksananya standar prosedur kerja yang telah ditetapkan.

### PUSTAKA

- ActionAid Australia dan Keumang, 2010. *Baseline Survei Sosial Ekonomi Petani Kakao di Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur*. Banda Aceh.
- ActionAid Australia dan Keumang, 2012. *Online Survei Sosial Ekonomi Petani Kakao di Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur*. Banda Aceh.
- Baihaqi, A., A. Anhar. A., Y., P. Safrizal, dan. Rudy. 2012. *Standar Prosedur Operasi Untuk Pembiayaan Bagi Modal Kerja Koperasi Kakao*. ActionAid Australia-Keumang. Banda Aceh.
- Horne, J., C., Van and M., J, Jr. 2009. *Fundamentals of Fiancial Manajemen, Buku 1 Ed 12*. Salemba Empat. Jakarta.
- Supardi, 2009. *Filsafat, Ilmu dan Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.